



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

**STUDI TENTANG KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**


Oleh:

LATIPAH
06 955 042

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

PADANG
2010

	No.Alumni Universitas	LATIPAH	No. Alumni Fakultas
	<p align="center">BIODATA</p> <p>a). Tempat/ Tgl Lahir: P.Sidempuan / 25 Desember 1985 b). Nama Orang Tua: Rasad dan Nurjannah c).Fakultas: Ekonomi d).Jurusan : Akuntansi e). No Bp: 06 955 042 f). Tanggal Lulus: 10 April 2010 g). Prediket Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3.07 i). Lama Studi: 3 Tahun 7 Bulan j). Jl. Andalas II No. 10 Padang Timur</p>		

STUDI TENTANG KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

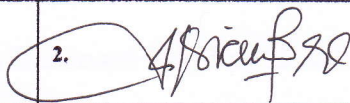
Skripsi S1 oleh Latipah Pembimbing : Drs. Edi Herman MBA,Akt

Abstrak

Perubahan paradigma telah terjadi dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan itu semakin diperjelas oleh lahirnya tripartite perundang-undangan (UU. No.17 tahun 2003 UU No.1 tahun 2004 dan UU No.15 tahun 2004). Yang kemudian disusul dengan lahirnya PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Studi ini meneliti tentang kesiapan pemerintah daerah kota Padang dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei terdiri dari dua cara yaitu kuisioner (pertanyaan tertulis) dan wawancara (pertanyaan lisan). Sumber data pada penelitian ini berasal dari jawaban responden yang di peroleh melalui kuisioner dan wawancara. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala dikatomi dengan bobot jawaban responden satu (1) untuk jawaban YA dan nol (0) untuk jawaban Tidak. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persentase (%) dengan menggunakan uji *validities* dan uji *reliabilities*, Yang telah iproses dengan menggunakan program spss.ver 13. Dari penelitian yang telah dilakukan maka, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Padang telah siap menerapkan standar akuntansi pemerintahan daerah. Tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk menerapkan SAP PP No. 24 Tahun 2005 adalah 85.5% yang artinya telah siap dalam menerapkan SAP PP No. 24 Tahun 2005.

Keyword: Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 April 2010 telah disetujui oleh pembimbing dan penguji:

Tanda Tangan	1.	2. 	3.
Nama Terang	Drs. Fauzi Saad, Ak	Dra. Sri Dewi Edmawati M.Si, Akt	Dra. Hj. Rahmi Desriani, M.Si, Akt

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi :

Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba. Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga atau organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia

Dalam rangka pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah dan dalam menghadapi era globalisasi ini, diperlukan adanya suatu standard akuntansi pemerintahan secara nasional baik untuk pemerintah pusat maupun daerah sehingga pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dapat lebih transparan, auditable dan dapat di akses dengan baik oleh publik.

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya , khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara *accountable* dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Terbitnya PP No.24 tentang SAP merupakan awal baru bagi pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan Negara yang transparan dan *accountable*. Keuangan Negara yang pengelolaannya dipisah dua yakni pusat dan daerah. Diharapkan semakin baik pada masa yang akan datang setidaknya-tidaknya dari segi regulasi dan petunjuk pelaksanaannya, untuk itu partisipasi dan kesiapan daerah sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka:

1. Tingkat kesiapan Dinas perindustrian, perdagangan & Temben dalam menerapkan SAP Daerah 80 % (siap)
2. Tingkat kesiapan Dinas Koperasi dalam menerapkan SAP Daerah 95 % (siap)
3. Tingkat kesiapan Dinas Olah Raga dan Pemuda dalam menerapkan SAP Daerah 80 % (siap)
4. Tingkat kesiapan Dinas Kesehatan dalam menerapkan SAP Daerah 90 % (siap)
5. Tingkat kesiapan Dinas Sosial dan Tenaga kerja dalam menerapkan SAP Daerah 85 % (siap)
6. Tingkat kesiapan Dinas Pasar dalam menerapkan SAP Daerah 80 % (siap)
7. Tingkat kesiapan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam menerapkan SAP Daerah 82.5 % (siap)

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian , Indra “ *Audit Sektor Publik*” Jakarta, Selemba Empat, 2006
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik “*Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah*” ed I , BPFE-Yogyakarta, 2006
- Halim, Abdul “*Akuntansi Keuangan Daerah* “ Jakarta, Selemba Empat, 2007
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah “ *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*” Jakarta, Selemba Empat, 2005
- Nordiawan , Deddi “*Akuntansi Sektor Publik* “ Jakarta, Selemba Empat, 2006
- Nordiawan, Deddi dkk “*Akuntansi Pemerintahan* “ Jakarta, Selemba Empat, 2007
- Sekaran, Uma “*Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* “Ed. Empat, Jakarta, Selemba Empat, 2006
- Suhanda, “*Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*” Padang, Andalas Lima Sisi, 2007
- Tanjung Abdul Hafiz “*Akuntansi Pemerintahan Daerah*” Bandung, AlfaBeta, 2007
- Triska Dona J, “*Tingkat Pemahaman Karyawan Pemerintah Daerah Kota Padang Terhadap SAP*” Padang, 2007